

Peran WALHI dalam Penanggulangan Bencana Nasional: Analisis Panduan dan Implementasi

Adzra Vania Rahmah¹, Wahyu Mei Lani², Lukman Nul Hakim Harahap³, Riskiya Ruksah Ritonga⁴, REH ULINA⁵, Aris Halomoan Hasibuan⁶, Fitri Nadilla Marpaung⁷

¹²³ Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober, 2025

Revised Oktober, 2025

Accepted Oktober, 2025

Available online Oktober, 2025

adzravania@students.usu.ac.id,

wahyumei@students.usu.ac.id,

lukmannul@students.usu.ac.id

riskyaruksah503@gmail.com,

ulinar272@gmail.com,

arishasimoan@gmail.com,

fitrinadilla07@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam penanggulangan bencana nasional, dengan fokus pada aspek panduan kebijakan dan implementasi di lapangan. WALHI sebagai organisasi masyarakat sipil memiliki kontribusi penting dalam advokasi lingkungan, mitigasi bencana, serta pemberdayaan komunitas terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas peran WALHI dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI memiliki kekuatan utama berupa jaringan organisasi yang luas, kapasitas advokasi tinggi, dan kredibilitas publik yang kuat dalam isu keadilan ekologis. Namun, kelemahan internal masih ditemukan pada aspek keterbatasan sumber daya, koordinasi antarwilayah, serta kesinambungan antara kebijakan advokasi dan implementasi praktis. Di sisi lain, peluang eksternal hadir dari meningkatnya perhatian

pemerintah terhadap mitigasi perubahan iklim, terbukanya kerja sama lintas-sektor, dan dukungan publik terhadap gerakan lingkungan. Sementara itu, ancaman utama berasal dari tekanan politik, kepentingan ekonomi korporasi, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa WALHI berperan strategis dalam memperkuat pendekatan ekologis dan partisipatif terhadap penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sinergi multi-aktor, serta pemantapan strategi advokasi berbasis data dan riset ilmiah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan nasional dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di bidang kebencanaan dan lingkungan.

Kata Kunci: WALHI, penanggulangan bencana nasional, analisis SWOT, organisasi masyarakat sipil, kebijakan lingkungan

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) in national disaster management, focusing on both policy guidelines and field implementation. As a civil society organization, WALHI plays a crucial role in environmental advocacy, disaster risk reduction, and community empowerment in disaster-prone areas. The research employs a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) approach to identify the internal and external factors influencing WALHI's effectiveness within Indonesia's disaster management framework.

The findings reveal that WALHI's main strengths lie in its extensive organizational network, strong advocacy capacity, and high public credibility in promoting ecological justice. However, internal weaknesses include limited operational resources, weak interregional coordination, and gaps between policy advocacy and on-ground implementation. Meanwhile, external opportunities emerge from the growing governmental attention to climate change mitigation, increasing cross-sector collaboration, and rising public support for environmental movements. Major threats include political pressure, corporate economic interests, and weak environmental law enforcement.

Overall, this study concludes that WALHI holds a strategic role in strengthening an ecological and participatory approach to national disaster management in Indonesia. To enhance its effectiveness, WALHI needs to improve institutional capacity, foster multi-stakeholder collaboration, and strengthen data-driven advocacy strategies. The results of this research are expected to contribute to the development of national disaster management policies and to reinforce cooperation between government institutions and civil society organizations in addressing environmental and disaster-related challenges.

Keywords: WALHI, national disaster management, SWOT analysis, civil society organization, environmental policy

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia. Letak geografis di antara pertemuan empat lempeng tektonik, kondisi iklim tropis, serta degradasi ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam menempatkan Indonesia dalam situasi darurat bencana. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi lebih dari 5.400 bencana, dengan 99,35% di antaranya berkorelasi dengan iklim, mulai dari banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan (BNPB, 2024). Tingginya frekuensi ini menunjukkan bahwa bencana tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena alamiah semata, tetapi juga sebagai konsekuensi dari kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola ruang.

Dalam konteks ini, peran organisasi masyarakat sipil menjadi penting sebagai mitra kritis sekaligus pelengkap dari upaya negara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia telah memainkan peran strategis dalam isu lingkungan sekaligus penanggulangan bencana. Sejak berdiri pada 1980, WALHI secara konsisten melakukan advokasi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Lebih jauh, melalui *Buku Saku Tanggap Bencana WALHI* (2024) dan publikasi *Bencana Ekologis: Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia* (2025), WALHI menegaskan bahwa bencana adalah akumulasi dari krisis sosial-ekologis yang dipicu oleh salah urus tata kelola sumber daya alam dan kebijakan pembangunan yang timpang.

Panduan penanggulangan bencana yang disusun WALHI mencakup seluruh fase kebencanaan: pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. WALHI tidak hanya bergerak dalam aspek teknis kebencanaan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ekologis, demokrasi, anti diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ke dalam setiap kerja-kerjanya. Pendekatan ini menjadikan WALHI unik dibandingkan aktor lain dalam penanggulangan bencana, karena menghubungkan advokasi struktural dengan praktik lapangan.

Namun, efektivitas panduan dan implementasi strategi WALHI masih membutuhkan analisis lebih mendalam. Bagaimana panduan tersebut diterjemahkan di tingkat eksekutif daerah dan komunitas? Bagaimana konsistensi nilai-nilai ekologis dijaga dalam praktik tanggap darurat? Serta, bagaimana peran litigasi dan konsep *Wilayah Kelola Rakyat (WKR)* berkontribusi dalam membangun resiliensi masyarakat menghadapi bencana? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memahami sejauh mana WALHI dapat menjadi model alternatif dalam penanggulangan bencana nasional.



Setiap organisasi pada dasarnya merupakan bagian dari jejaring sosial yang berusaha memberikan sekumpulan penciptaan nilai bagi para stakeholder-nya. Menurut mazhab perencanaan strategik, suatu penciptaan nilai yang optimal hanya dapat dihasilkan melalui strategi-strategi yang sepenuhnya selaras dengan dinamika lingkungan eksternalnya. Dialektika penyesuaian pemikiran antara karakteristik-karakteristik internal (kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan) dan dinamika eksternal (peluang-peluang maupun ancaman-ancaman) organisasi tersebut.

Menurut Rangkuti (2008, 172), analisis SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. Dari keempat analisis tersebut, yakni analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) kemudian akan memunculkan empat model strategi yaitu: Strategi SO (*Strength-Opportunity*), Strategy WO (*Weakness-Opportunity*), Strategist (*Strength-Weakness*), dan Strategi WT (*Weakness Threat*).

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori analisis SWOT, karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memperhatikan kekuatan dan kelemahan panduan penanggulangan bencana oleh organisasi. Hal ini dikarenakan analisis SWOT mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan yang manakah perlu diperkuat dan penguatan-penguatan seperti apakah yang dapat diupayakan untuk menciptakan nilai. Lalu peluang-peluang manakah yang memang berguna untuk dimanfaatkan oleh organisasi dan yang manakah dicermati sebagai ancaman-ancaman dimana organisasi perlu bersiap-siap untuk menghadapinya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Organisasi Masyarakat Sipil dan Penanggulangan Bencana

Literatur mengenai peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam penanggulangan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa OMS dapat berfungsi sebagai pelengkap bagi pemerintah dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Misalnya, penelitian mengenai sistem pengambilan keputusan penanganan bencana alam di Indonesia menyebut bahwa koordinasi antara pemerintah dan non-pemerintah menjadi aspek penting untuk meningkatkan respons bencana. Dalam konteks Indonesia, OMS dapat memobilisasi komunitas lokal, memberikan advokasi kebijakan, serta melakukan pengawasan implementasi program penanggulangan bencana.

2. Peran WALHI dalam Isu Lingkungan dan Bencana

Beberapa kajian secara spesifik menyoroti peran WALHI sebagai OMS yang aktif dalam advokasi lingkungan dan isu-bencana. Sebagai contoh:

- 1. WALHI menyatakan bahwa banyak bencana ekologis di Indonesia - termasuk banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan - yang sejatinya dipicu oleh kerusakan lingkungan dan perencanaan ruang yang buruk. "Indonesia sudah berada dalam situasi darurat ekologis."*
- 2. Dalam sebuah artikel dari ANTARA News tahun 2006, WALHI menyimpulkan bahwa negara belum optimal menyelesaikan bencana ekologis karena masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan seperti perundangan, pengelolaan lingkungan dan kebijakan korporasi.*
- 3. Contoh aksi lapangan: Di Provinsi Sumatera Selatan, relawan Desk Disaster WALHI Sumsel dikerahkan untuk siaga menghadapi banjir dan tanah longsor musim hujan.*



4. WALHI juga mendorong gugatan hukum terhadap pemerintah terkait bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dengan demikian, peran WALHI bukan hanya pada aspek advokasi kebijakan tetapi juga praktik lapangan seperti kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

3. Tantangan dan Implementasi Penanggulangan Bencana di Indonesia

Kajian mengenai penanggulangan bencana di Indonesia menunjukkan beberapa tantangan kunci yang relevan dengan penelitian ini:

1. Banyak bencana di Indonesia adalah hidrometeorologis (banjir, longsor, kekeringan) yang intensitasnya meningkat akibat perubahan iklim dan kerusakan ekologis.
2. Terdapat kelemahan dalam tata ruang, alih fungsi lahan, dan perencanaan ruang yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. WALHI menyoroti mismanagement tata ruang di Pulau Jawa sebagai penyebab meningkatnya banjir dan longsor.
3. Peran aktor non-pemerintah (seperti OMS) dalam ekosistem penanggulangan bencana perlu dikaitkan dengan kapasitas organisasi, koordinasi multi-aktor, sumber daya dan legitimasi sosial. Misalnya, riset internasional menunjukkan bahwa untuk program cash transfer pasca-bencana, NGO harus membangun “ekosistem respons” yang melibatkan negara, pasar lokal, dan komunitas.

4. Panduan, Kebijakan dan Implementasi: Kesenjangan antara Panduan dan Praktik

Dalam literatur juga ditemukan bahwa meskipun terdapat berbagai panduan dan regulasi penanggulangan bencana (seperti di Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana), implementasi di lapangan sering menemui hambatan seperti: kurangnya koordinasi, sumber daya terbatas, dan tidak terlibatnya masyarakat secara optimal. Untuk organisasi seperti WALHI, ini berarti bahwa memastikan implementasi yang efektif bukan hanya soal advokasi panduan, tetapi juga bagaimana panduan itu diadaptasi dan dijalankan dalam konteks lokal. WALHI sendiri dalam artikelnya menyampaikan bahwa isu struktural seperti korporasi besar, izin ekstraktif, dan kebijakan ruang perlu menjadi bagian dari mitigasi bencana – bukan hanya respons pasca bencana.

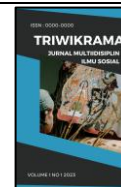
5. Kerangka Konseptual untuk Analisis Peran WALHI

Berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini dapat menggunakan kerangka konseptual berikut:

1. Faktor-internal organisasi (seperti kapasitas WALHI, relawan Desk Disaster, advokasi kebijakan).
2. Faktor-eksternal lingkungan (seperti kebijakan pemerintah, regulasi, kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan).
3. Implementasi di lapangan (kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan).
4. Dampak serta tantangan implementasi (koordinasi, sumber daya, legitimasi). Kerangka ini akan mendukung analisis melalui metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk menggambarkan peran WALHI dalam penanggulangan bencana nasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk menganalisis peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam penanggulangan bencana nasional, baik dari segi panduan kebijakan maupun implementasi lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi strategis WALHI dalam menghadapi dinamika



kebencanaan nasional, termasuk efektivitas program, kendala internal, serta potensi kolaborasi lintas sektor.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen yang meliputi laporan tahunan WALHI, pedoman penanggulangan bencana nasional, peraturan pemerintah terkait mitigasi bencana, serta publikasi ilmiah dan berita resmi. Seluruh data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) dari aspek internal organisasi, serta peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dari lingkungan eksternal yang memengaruhi peran WALHI.

Analisi Data

1. Identifikasi data primer dan sekunder, mencakup kebijakan, kegiatan, serta program kerja WALHI dalam konteks penanggulangan bencana.
2. Klasifikasi faktor internal dan eksternal, yang kemudian dimasukkan ke dalam matriks SWOT.
3. Analisis posisi strategis WALHI berdasarkan hasil perbandingan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
4. Perumusan strategi rekomendatif, yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas peran WALHI dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan dokumen, guna memastikan bahwa setiap temuan analisis bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam sistem penanggulangan bencana nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL dan PEMBAHASAN

ANALISIS SWOT

1. Strengths (Kekuatan)

a. Pendekatan Berbasis Ekosistem dan Keadilan Ekologis

WALHI memiliki pendekatan yang kuat dan khas dalam penanggulangan bencana, yakni mengintegrasikan keadilan ekologis dan restorasi lingkungan dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Pendekatan ini membedakan WALHI dari lembaga penanggulangan bencana lain yang cenderung teknokratis. “Mitigasi bencana yang dilakukan tanpa memperbaiki kerusakan lingkungan hanya akan memindahkan risiko, bukan menghilangkannya.” (WALHI, 2020)

b. Keterlibatan dan Pemberdayaan Komunitas

WALHI secara konsisten mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam analisis risiko, pengambilan keputusan, dan implementasi kegiatan kebencanaan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan keberlanjutan dalam program-program yang mereka jalankan (Twigg, 2015).

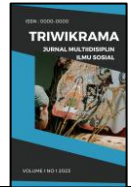
c. Jaringan Luas dan Akar Rumpun yang Kuat

Sebagai organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia dalam bidang lingkungan hidup, WALHI memiliki jaringan nasional yang kuat, termasuk di tingkat daerah dan desa. Hal ini memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dan kontekstual dalam menghadapi krisis bencana.

2. Weaknesses (Kelemahan)

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan

Meski memiliki jaringan luas, WALHI menghadapi keterbatasan dalam sumber daya finansial dan logistik untuk melaksanakan program penanggulangan bencana secara berkelanjutan dan



berskala besar. Hal ini membatasi replikasi praktik baik mereka ke wilayah lain yang membutuhkan.

b. Tidak Terintegrasi dalam Struktur Formal Pemerintah

WALHI dan organisasi masyarakat sipil lainnya belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem kelembagaan resmi kebencanaan nasional seperti BNPB atau BPBD. Hal ini menyulitkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam hal pembagian peran dan akses terhadap informasi serta anggaran (Sopaheluwakan, 2021).

c. Kurangnya Dokumentasi Sistematis dan Monitoring Jangka Panjang

Sebagian program WALHI belum terdokumentasi secara sistematis, terutama dalam hal evaluasi dampak jangka panjang terhadap pengurangan risiko bencana di komunitas dampingan.

3. Opportunities (Peluang)

a. Kesadaran Lingkungan dan Iklim yang Meningkatkan

Meningkatnya kesadaran publik dan internasional terhadap krisis iklim dan bencana ekologis memberikan ruang bagi WALHI untuk memperkuat narasi dan posisi mereka dalam kebijakan nasional.

b. Kerja Sama dengan Lembaga Internasional dan Pemerintah

Terdapat peluang untuk memperluas kemitraan strategis dengan lembaga donor, universitas, dan pemerintah lokal/nasional dalam membangun program adaptasi berbasis komunitas dan mitigasi bencana berbasis alam (nature-based solutions).

c. Regulasi yang Mulai Mendukung Partisipasi Masyarakat

Beberapa regulasi nasional seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam sistem penanggulangan bencana, yang dapat dimanfaatkan WALHI untuk memperluas pengaruhnya.

4. Threats (Ancaman)

a. Dominasi Industri Ekstraktif dan Politik Pembangunan Elitis

Salah satu tantangan utama yang dihadapi WALHI adalah kuatnya kepentingan industri tambang, perkebunan skala besar, dan infrastruktur yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Hal ini menyebabkan WALHI sering berhadapan langsung dengan kebijakan negara atau korporasi besar. “Di banyak daerah, pemerintah daerah lebih melindungi investasi tambang daripada keselamatan warga dari bencana.” (WALHI, 2021)

b. Krisis Iklim yang Semakin Kompleks

Perubahan iklim mempercepat frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Hal ini dapat membuat pendekatan konvensional tidak lagi cukup, sementara WALHI juga perlu memperkuat kapasitasnya dalam riset dan pengembangan teknologi adaptif.

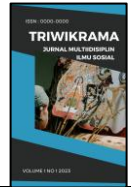
c. Represi terhadap Organisasi Masyarakat Sipil

Dalam beberapa kasus, WALHI menghadapi ancaman kriminalisasi dan represi karena advokasi mereka yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi tertentu, terutama dalam konflik agraria dan lingkungan.

Analisis Sintesis

Analisis SWOT menunjukkan bahwa WALHI memiliki kekuatan konseptual dan operasional yang signifikan dalam bidang penanggulangan bencana. Keterlibatan komunitas, pendekatan ekologis, dan jaringan akar rumput adalah modal utama yang belum sepenuhnya dimiliki oleh lembaga formal seperti BNPB.

Namun, tantangan struktural dan sistemik menjadi penghalang besar bagi efektivitas jangka panjang WALHI. Oleh karena itu, integrasi yang lebih kuat antara organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dengan lembaga formal, serta dukungan pendanaan dan perlindungan hukum terhadap kerja advokasi, menjadi kunci keberlanjutan peran mereka dalam sistem kebencanaan nasional.



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam penanggulangan bencana nasional, dapat disimpulkan bahwa WALHI memiliki posisi strategis sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang berperan penting dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia.

1. Kekuatan (Strengths): WALHI memiliki jaringan luas di tingkat nasional hingga daerah, kapasitas advokasi yang kuat, serta kredibilitas tinggi dalam isu lingkungan dan keadilan ekologis. Melalui kampanye dan advokasi publik, WALHI mampu mendorong perubahan kebijakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akar penyebab bencana ekologis.
2. Kelemahan (Weaknesses): Tantangan utama yang dihadapi WALHI adalah keterbatasan sumber daya operasional, keterbatasan koordinasi lintas lembaga, dan belum optimalnya sinergi antara program advokasi dan implementasi teknis di lapangan.
3. Peluang (Opportunities): Peningkatan perhatian pemerintah terhadap mitigasi perubahan iklim, terbukanya akses kolaborasi lintas-sektor, serta meningkatnya kesadaran publik terhadap isu keberlanjutan menjadi peluang besar bagi WALHI untuk memperkuat perannya dalam kebijakan penanggulangan bencana.
4. Ancaman (Threats): Tekanan politik, kepentingan ekonomi korporasi, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi ancaman serius terhadap efektivitas advokasi WALHI. Selain itu, perubahan iklim global memperbesar risiko bencana ekologis yang kompleks dan sulit diprediksi.

Secara keseluruhan, WALHI berperan signifikan dalam mendorong integrasi aspek ekologis ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional, baik melalui advokasi kebijakan, edukasi publik, maupun pendampingan komunitas terdampak. Namun, agar kontribusi tersebut semakin optimal, WALHI perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kolaborasi multi-aktor, dan memastikan bahwa advokasi kebijakan sejalan dengan aksi nyata di lapangan.

Saran

1. Penguatan Kapasitas dan Sinergi Internal WALHI:
Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem koordinasi antarwilayah, serta perencanaan program yang lebih terintegrasi antara advokasi, riset, dan aksi lapangan.
2. Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah dan BNPB:
WALHI perlu memperluas kerja sama dengan lembaga pemerintah, terutama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), guna memperkuat penyusunan panduan mitigasi bencana berbasis lingkungan.
3. Peningkatan Basis Data dan Riset Lapangan:
Pengembangan sistem data dan dokumentasi kasus bencana ekologis penting untuk memperkuat bukti ilmiah dalam advokasi kebijakan dan meningkatkan kualitas rekomendasi yang diajukan.
4. Pendidikan Publik dan Pemberdayaan Komunitas Lokal:
WALHI dapat memperluas program edukasi kebencanaan berbasis ekologi untuk



masyarakat akar rumput, guna menumbuhkan kesadaran kolektif dan kapasitas adaptasi komunitas terhadap risiko bencana.

5. Advokasi Reformasi Kebijakan Lingkungan:

WALHI diharapkan terus berperan aktif dalam mendorong reformasi kebijakan tata ruang, pengelolaan hutan, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, karena hal tersebut merupakan faktor kunci dalam pencegahan bencana ekologis.

5. DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2024). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. Jakarta: BNPB.

Hilhorst, D. (2018). *Disaster Risk Governance: Resilience, Responsibility and Reflexivity*. Disaster Studies, Wageningen University.

Kelman, I. (2022). *Disaster by Choice: How Our Actions Turn Natural Hazards into Catastrophes*. Oxford: Oxford University Press.

Mismanagement of Spatial Planning Fuels Disaster in Java Island.” WALHI Press Release, 24 Jan 2023.

Relawan WALHI Sumsel Siaga Bencana Banjir.” ANTARA News, 29 Des 2018.

Saputra, Dodi. *Green Social Movement dan Civil Society: Peran WALHI dalam Mengadvokasi Dampak Krisis Iklim Masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Sopaheluwakan, J. (2021). Peran masyarakat sipil dalam sistem kebencanaan nasional. *Jurnal Kebencanaan Indonesia*, 12(2), 134-149.

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suryanti, Made Selly Dwi. “Bencana Kabut Asap: Pandangan dan Sikap Non-Governmental Organization.” *FETRIAN*, vol. 4, no. 1, 2022, hlm. 63-82.

Trinata, A., Perdana, D. R., Harahap, G., dkk. (2025). *Bencana Ekologis: Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru & WALHI.

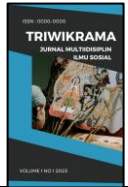
Twigg, J. (2015). *Disaster Risk Reduction*. Overseas Development Institute.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. Geneva: UNDRR.

Walhi: Negara Belum Optimal Selesaikan Bencana Ekologis.” ANTARA News, 21 Des 2006.

WALHI. (2024). *Buku Saku Tanggap Bencana WALHI*. Jakarta: WALHI.

WALHI. (2021). *Laporan Tahunan WALHI 2021*.



WALHI. (2020). *Panduan penanggulangan bencana berbasis ekosistem dan keadilan ekologis*. WALHI

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. London: Routledge.